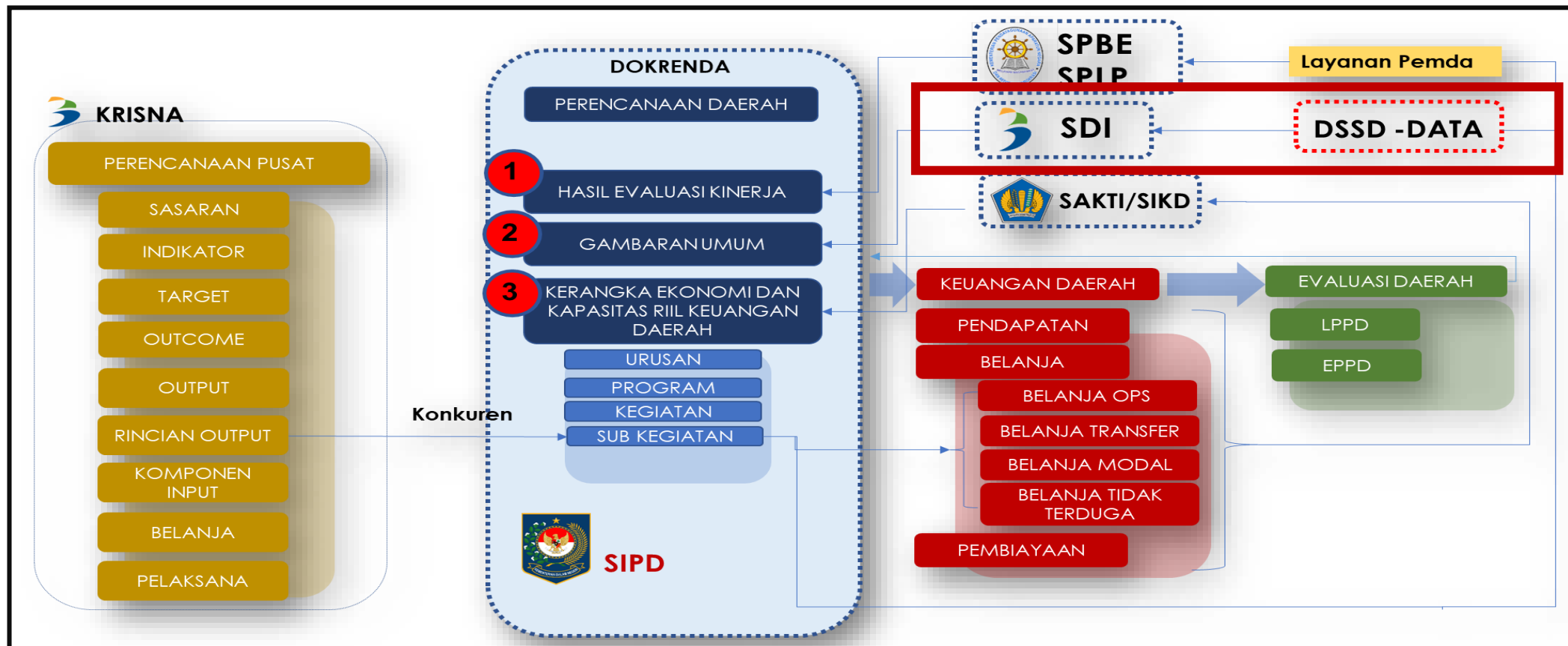


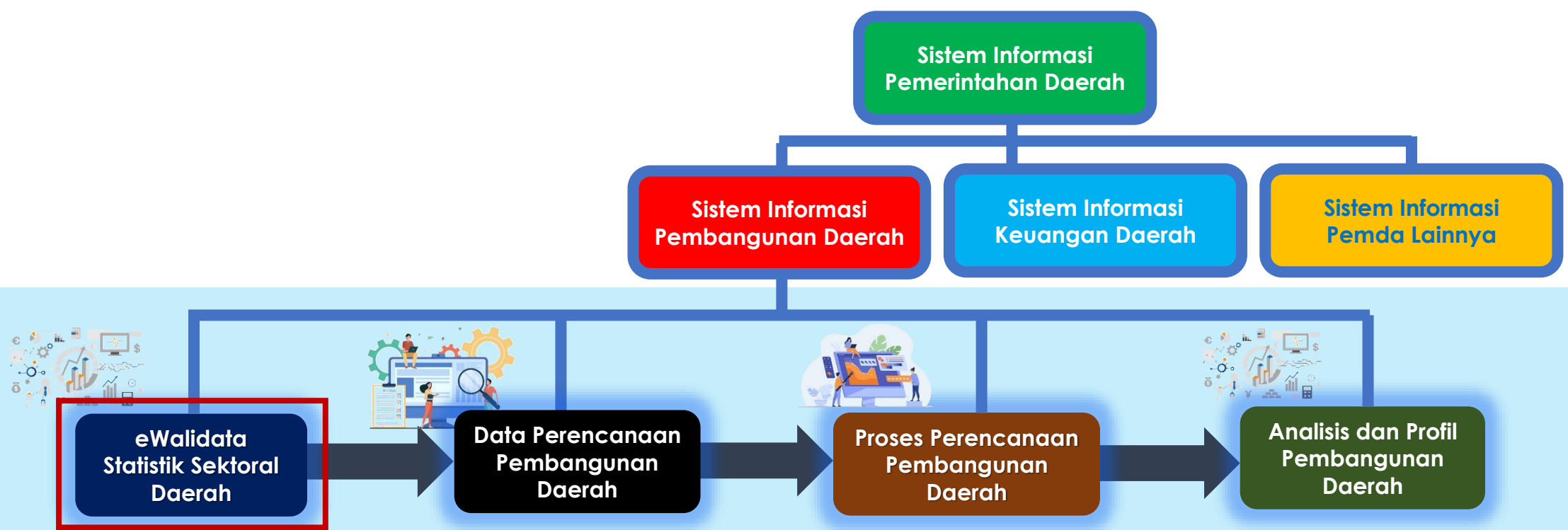


DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH |

PENINGKATAN KUALITAS DATA PERENCANAAN MELALUI OPTIMALISASI KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH DALAM E-WALIDATA SIPD



1. SIPD memuat Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemda Lainnya (berdasarkan Permendagri 70/2019).
2. Dalam menyusun dokumen perencanaan daerah (Dokrenda), **diperlukan data-data yang berkualitas sebagai bentuk pendekatan teknokratik** untuk menentukan Visi, Tujuan, Sasaran, Kinerja dan Target Pembangunan → Good Data Good Planning Good Policy Good Decision
3. Data-data tersebut di SIPD dikelola melalui aplikasi DSSD, yang memuat **data capaian kinerja output serta data-data dukungan lainnya** sesuai kewenangan daerah yang menjadi bagian dan **diintegrasikan dengan Portal SDI**, kedepan, **data capaian kinerja outcome juga akan segera disusun**

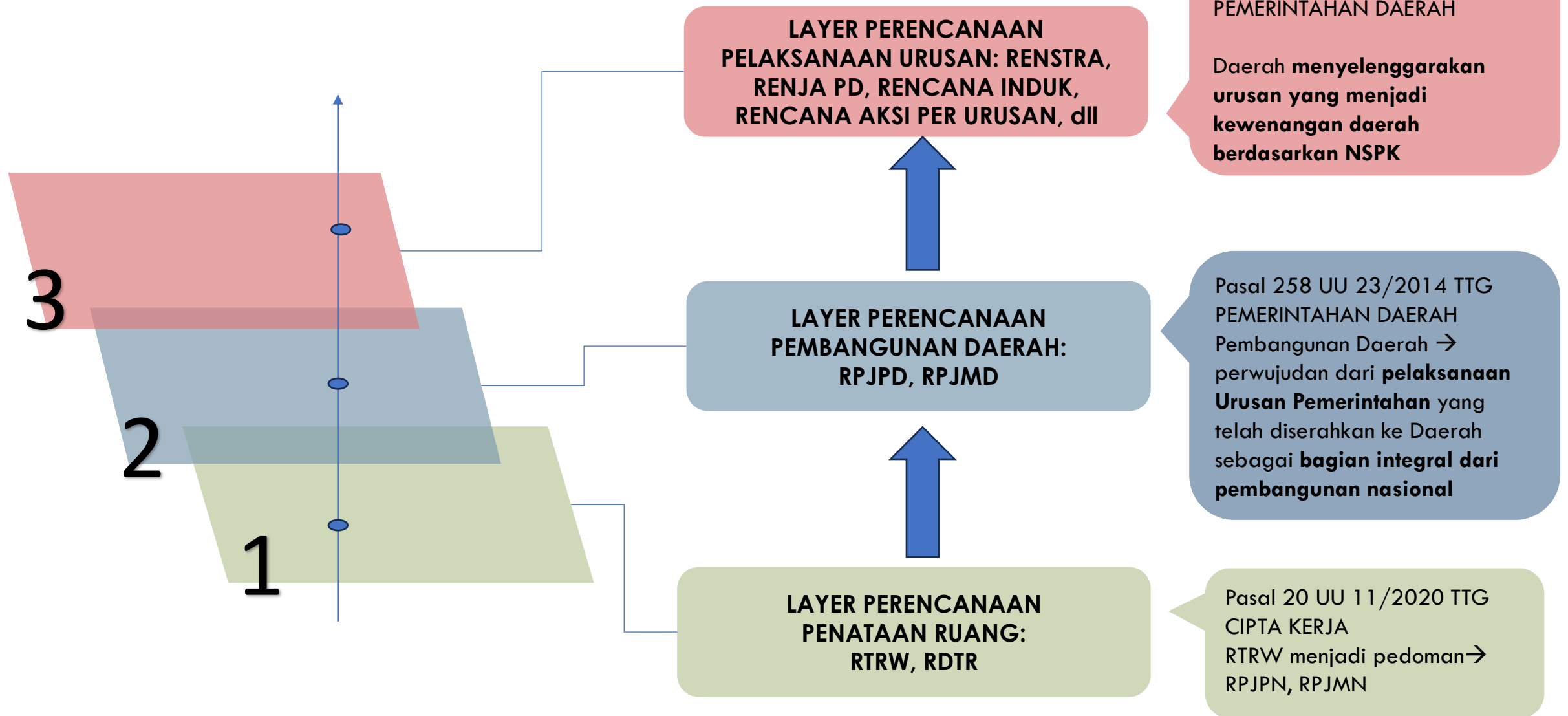


- **Sistem Informasi Pembangunan Daerah** dimulai dari proses e-walidata, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
- **Proses e-walidata** berisikan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang melibatkan walidata, produsen data dan pembina data, proses ini **menjamin data dan informasi yang valid** sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- **Data Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah **proses sinkronisasi data pusat dan daerah** yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan **7 (tujuh) aspek informasi** yaitu geografis, demografis, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
- **Proses perencanaan pembangunan daerah** yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data **menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah** yang berkualitas
- **Analisis dan profil** memberikan **gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah**, serta **proyeksi pembangunan daerah** ke depan

PENDAHULUAN | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



LAYER-LAYER PERENCANAAN DI DAERAH





DASAR HUKUM PEMANFAATAN DATA DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKREDA

RPJPD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Sasaran Pokok pada RPJPD**

RPJMD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Sasaran pada RPJMD**

RKPD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD**

- **Pasal 274** UU 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada **data dan informasi** yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- **Pasal 144** Permendagri 86/2017 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada **data dan informasi yang dikelola dalam SIPD**
- **Pasal 14** Permendagri 70/2019 Hasil **pengelolaan data** berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.





PENDEKATAN TEKNOKRATIS

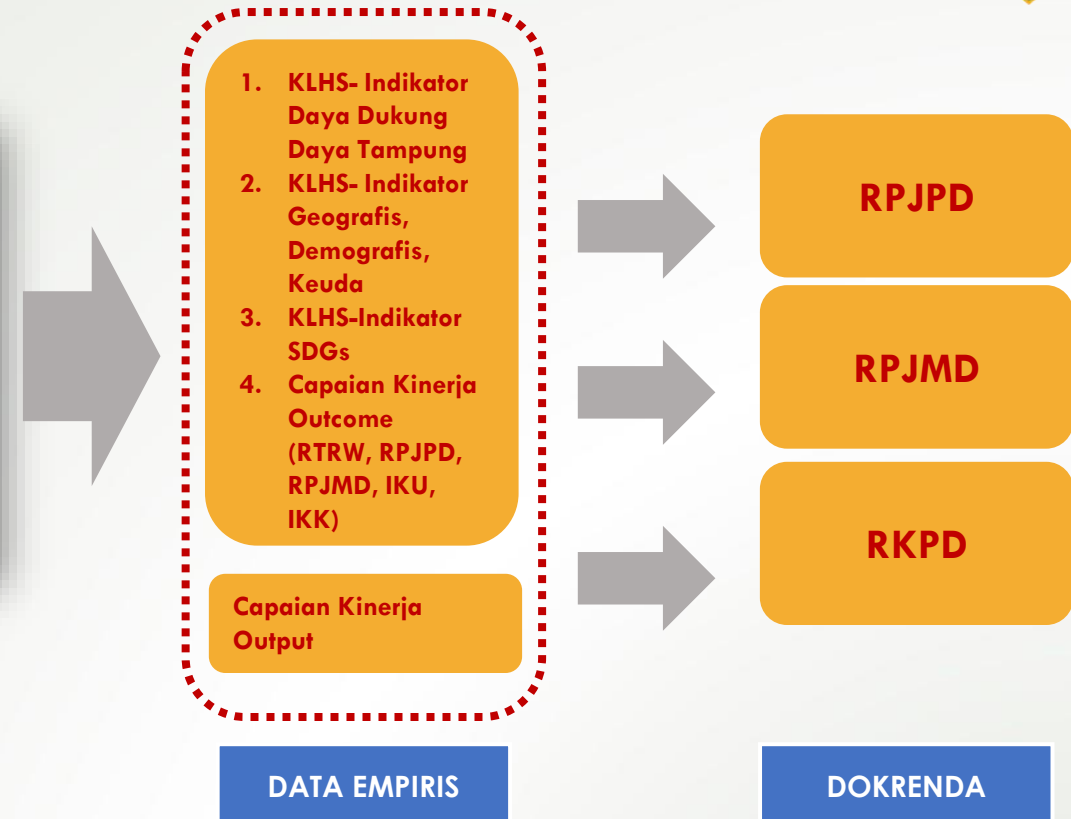
Ps. 8

Pasal 8

(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

RANCANGAN TEKNOKRATIS:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
2. gambaran keuangan Daerah;
3. permasalahan pembangunan Daerah;
4. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
5. perumusan isu strategis Daerah





PRINSIP SDI DAN DATA DAN INFORMASI

Ps. 8

- a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data IPD berbasis elektronik;
- b. Data IPD harus memenuhi prinsip satu data Indonesia.

Ps. 9

- a. Pengelolaan Data melalui Tahapan: Perencanaan, Pengumpulan, Pengisian dan Pemeriksaan Data;
- b. Pengelolaan Data dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bappeda, Produsen Data dan Walidata.
- c. Daerah dapat membentuk tim sesuai kebutuhan daerah

Perpres 39/2019

Pasal 3

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

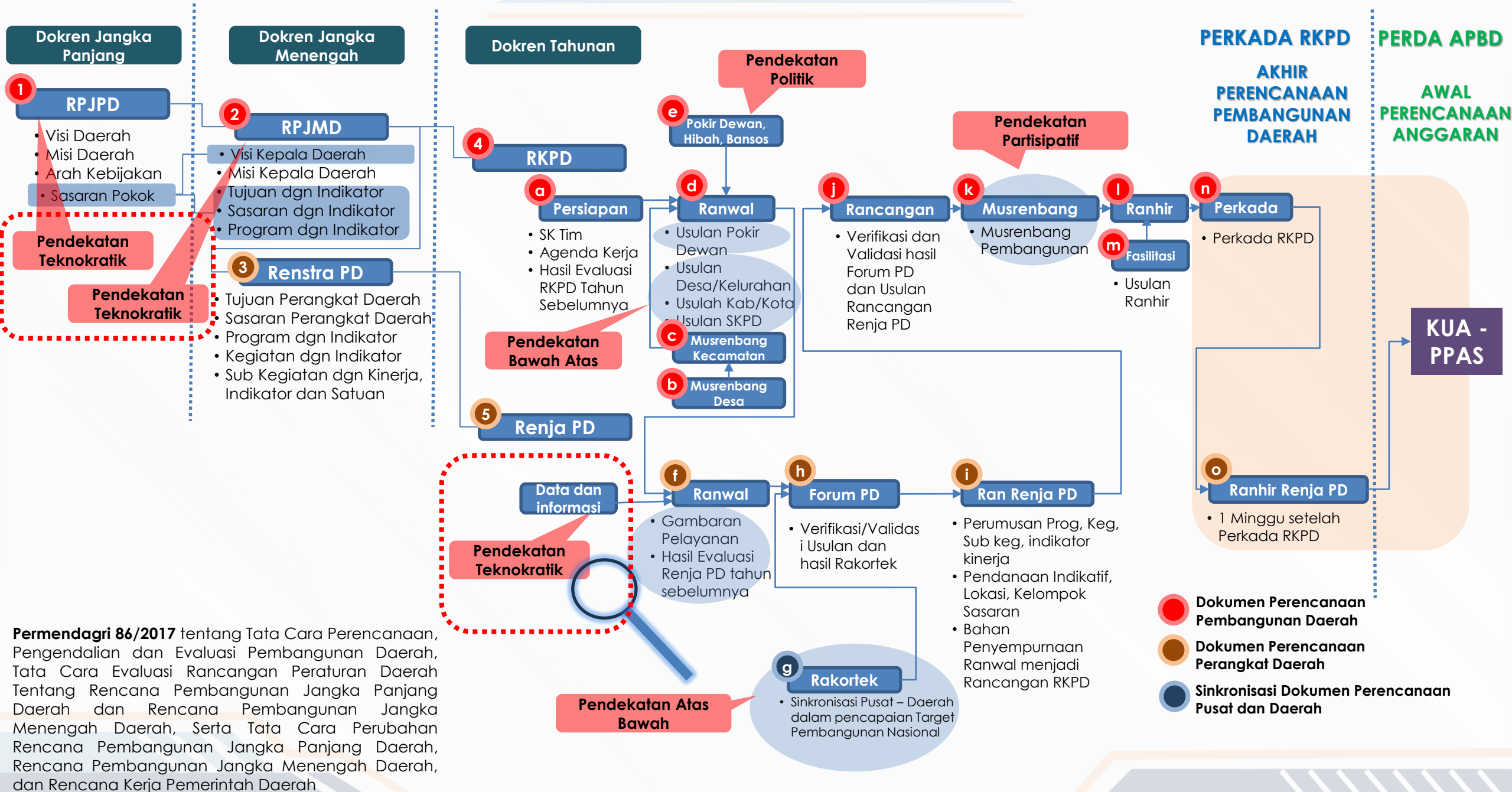
- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 25

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

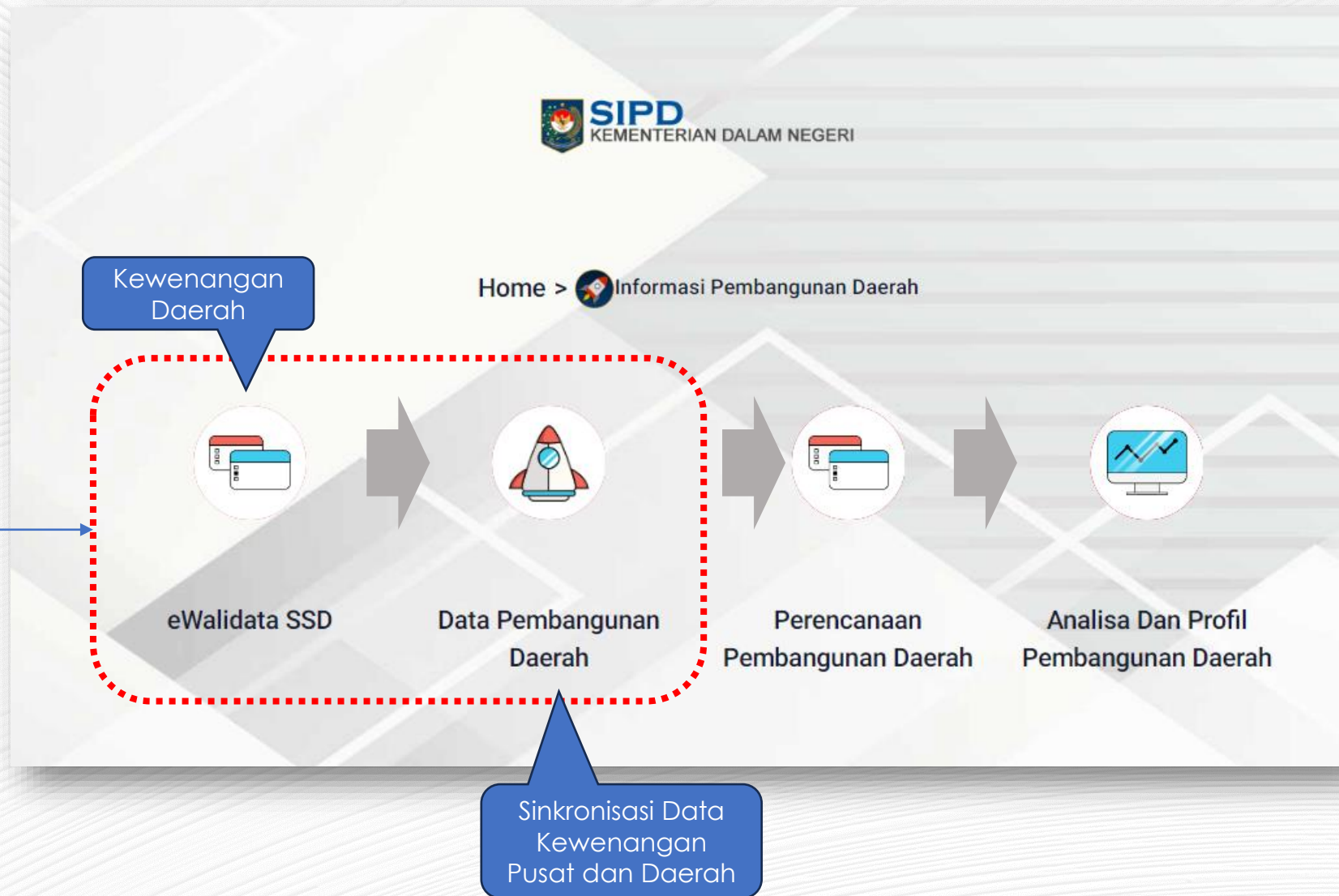
- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

PROSES BISNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





ALUR DATA PADA SIPD-RI



KONKURENSI | URUSAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DEFINISI PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN | BERDASARKAN PERMENDAGRI 90/2019 TTG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1

Program adalah Sub Urusan

		Kewenangan pusat		Kewenangan daerah	
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4	5	
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Konkuren
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	---	Konkuren
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.	Konkuren
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Konkuren

2

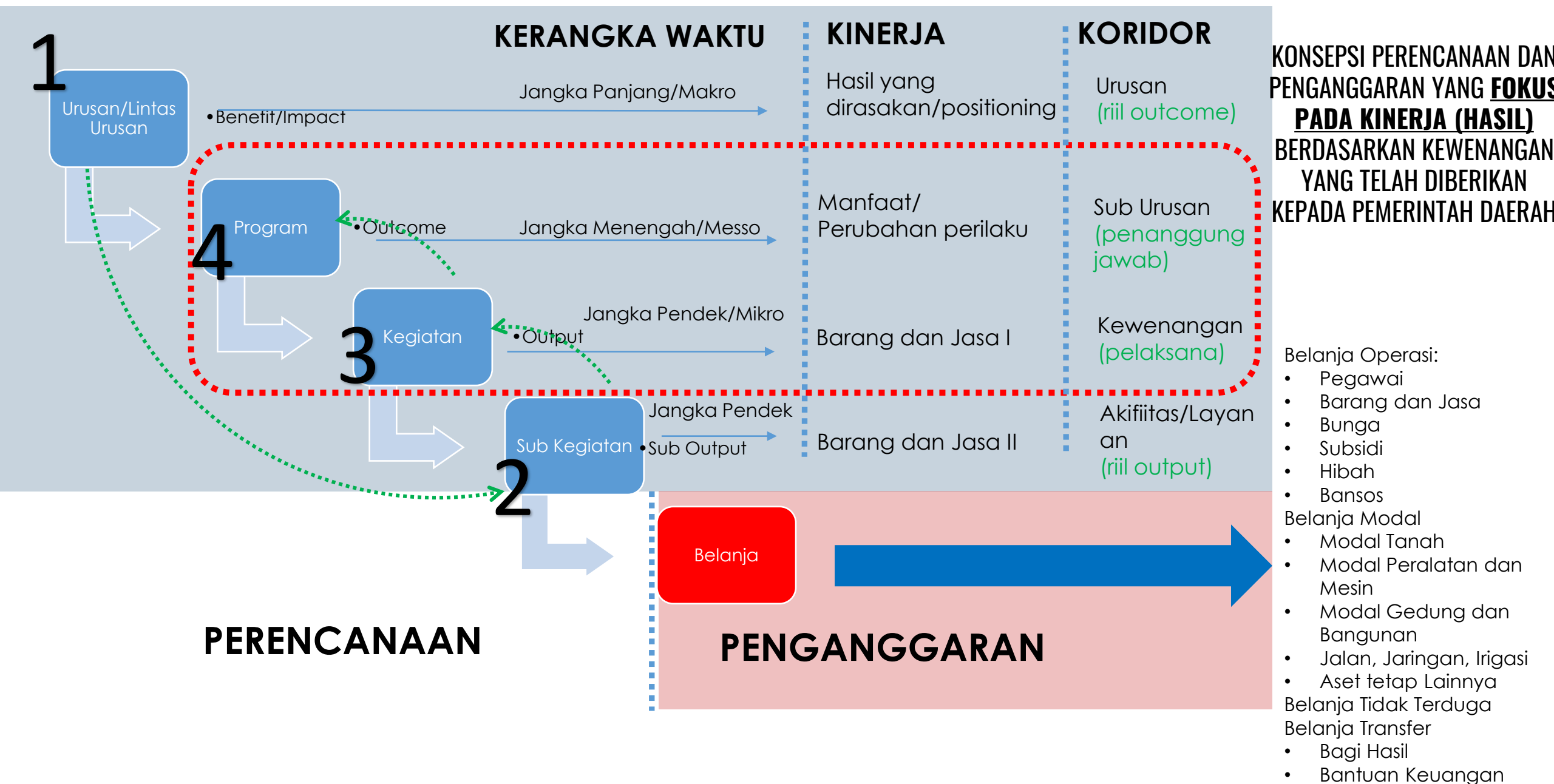
Kegiatan Pusat adalah kewenangan pusat

Kegiatan Daerah adalah kewenangan daerah

3

Sub Kegiatan adalah Aktifitas/Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

HUBUNGAN TINGKATAN KINERJA URUSAN/LINTAS URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN

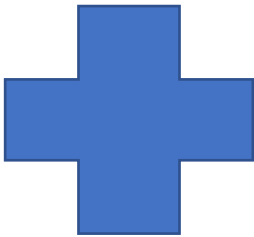
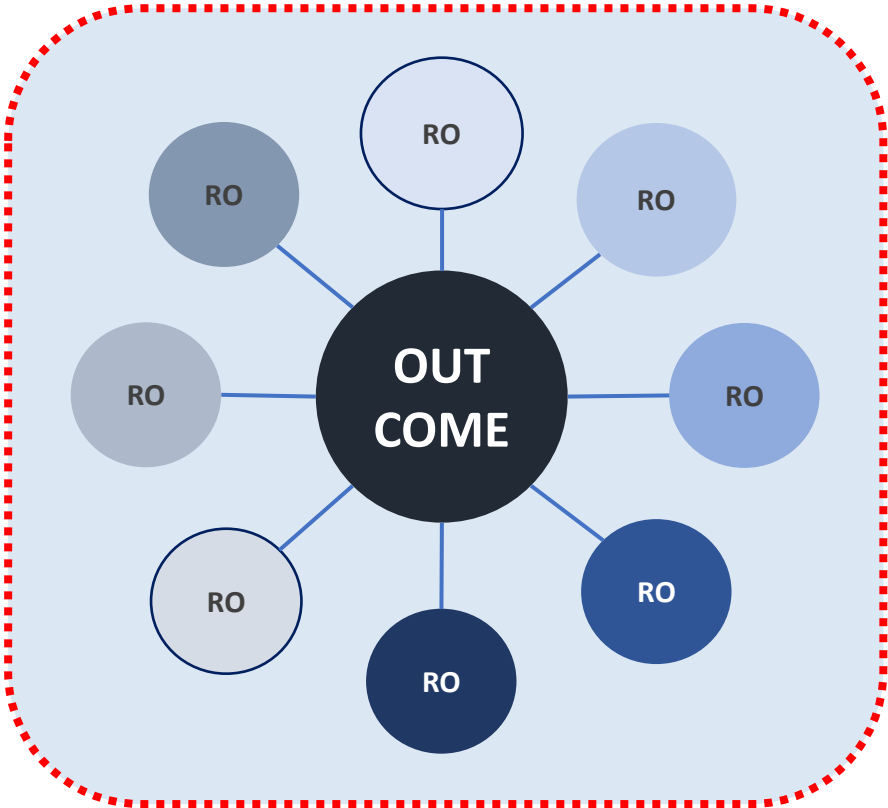


ILUSTRASI KINERJA KONKURENSI PUSAT DAN DAERAH

KONKUREN

PUSAT

DUKUNGAN RINCIAN OUTPUT (RO) KL
TERHADAP CAPAIAN IKUR/LU (TEMATIK)



DAERAH

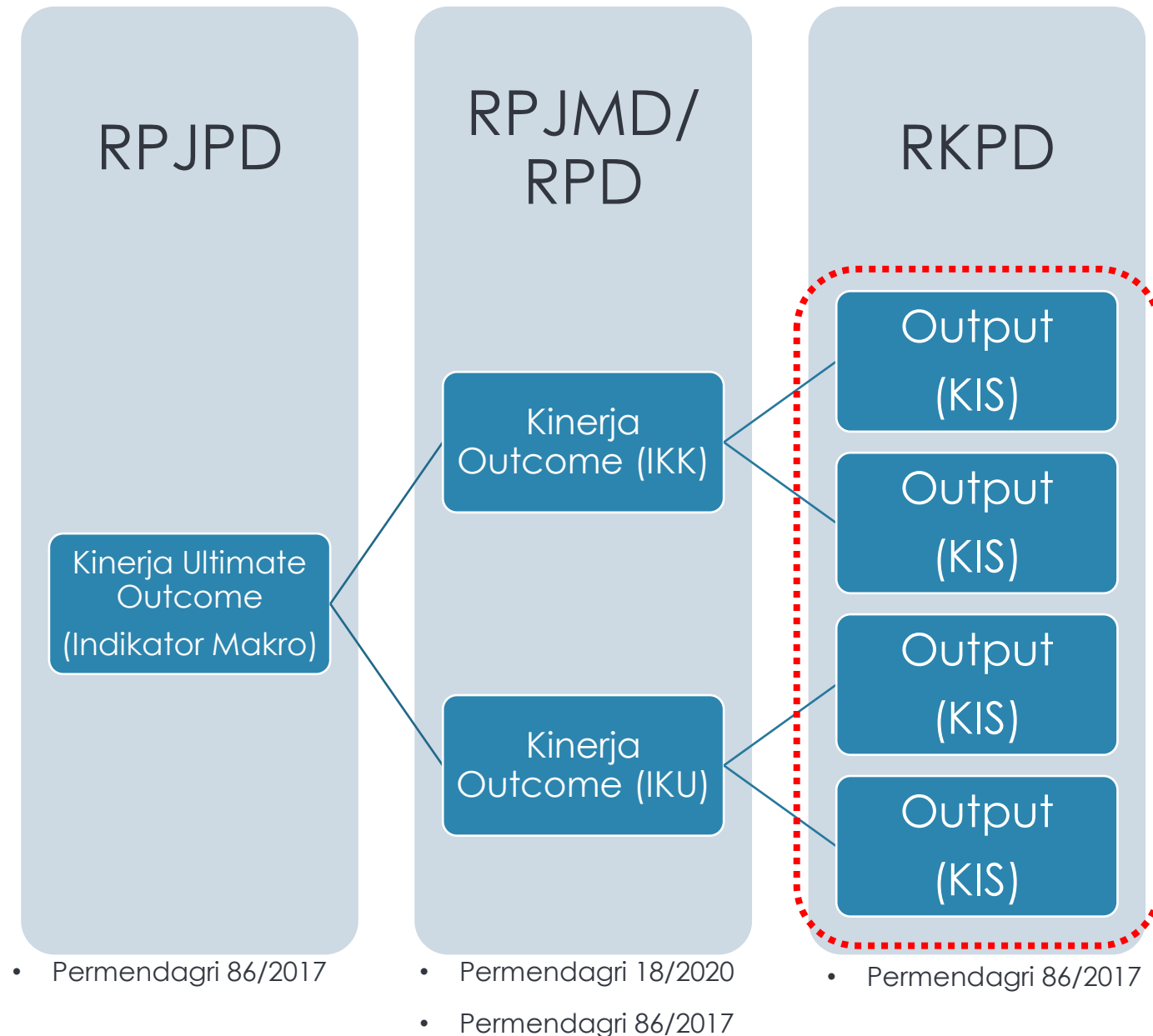
DUKUNGAN SUB KEGIATAN TERHADAP
CAPAIAN IKUR/LU (TEMATIK)



OUTCOME: HASIL DARI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (IKK DAN IKU)

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

- **Evaluasi RPJPD**, meliputi:
 - **Evaluasi Capaian Kinerja Ultimate Outcome Daerah** yang diukur melalui Indikator Makro Sasaran Pokok yang mendukung Visi dan Misi Daerah, serta Arah Kebijakan Daerah
- **Evaluasi RPJMD**, meliputi:
 - **Evaluasi Capaian Kinerja Outcome Pemerintahan Daerah (IKD)** yang diukur melalui Indikator dalam satu urusan (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah-IKK) dan Indikator lintas urusan (Indikator Kinerja Utama-IKU) yang mendukung Indikator Makro Sasaran Pokok RPJPD
- **Evaluasi RKPD**, meliputi:
 - **Evaluasi Capaian Kinerja Output** yang diukur melalui Indikator Output (Kinerja, Indikator, dan Satuan-KIS) yang mendukung Kinerja Outcome RPJMD



DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | **SIPD SEBAGAI APLIKASI UMUM**





DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RANCANGAN KEMENPAN TENTANG SIPD SEBAGAI APLIKASI UMUM

PROSES BISNIS LEVEL 0

PROSES BISNIS LEVEL 0-DAB28-09.01
**SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH**

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL I-DAB28-09.01.04
**MENGELOLA INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH**

PROSES BISNIS LEVEL 2

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.01
**MENGELOLA DATA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.02
**MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.03
**MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.04
**MELAKUKAN ANALISIS DAN PROFIL
PEMBANGUNAN DAERAH**



PROSES BISNIS LEVEL 0-DAB28-09.01 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis level 0-DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini meliputi:

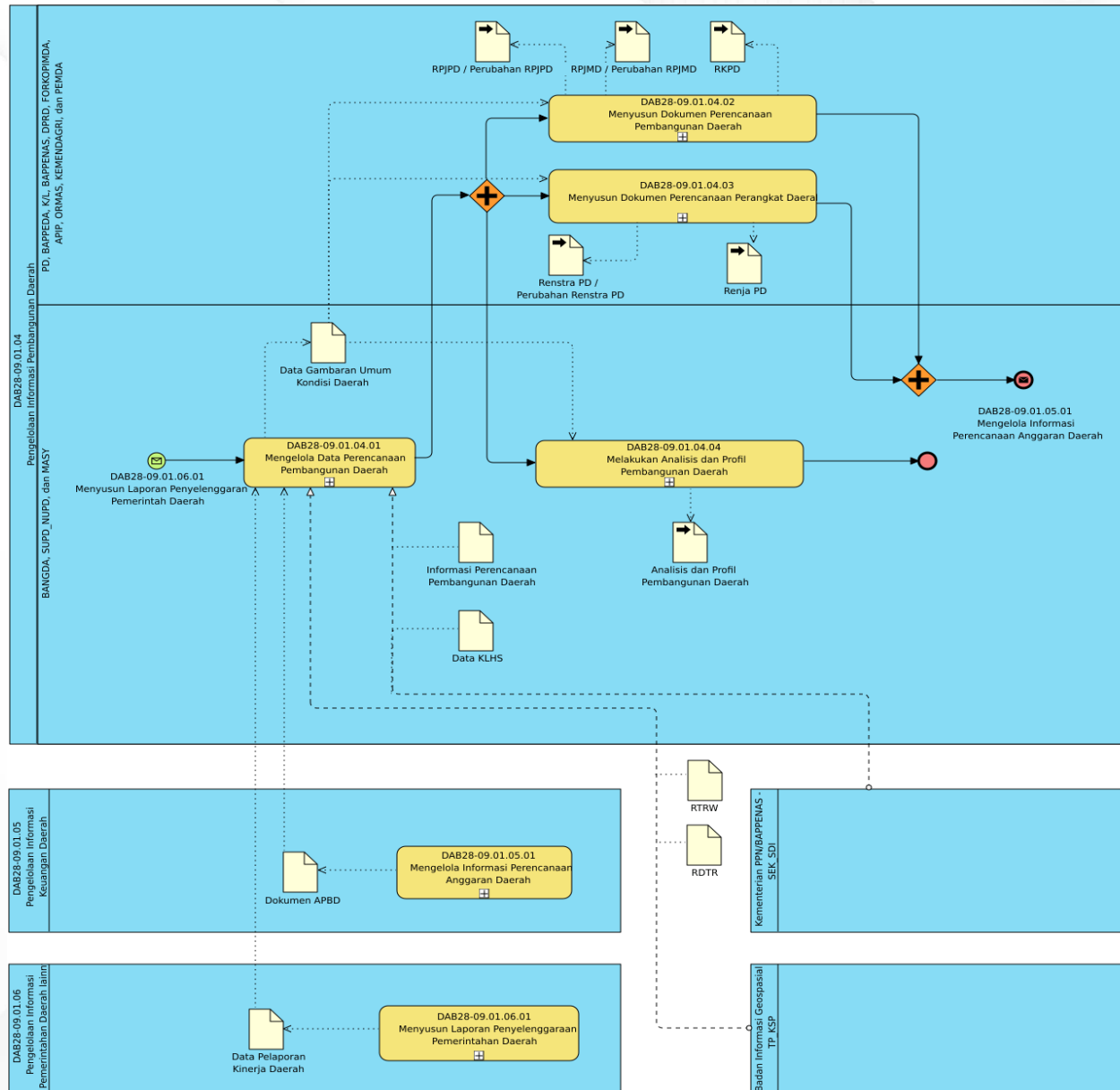
1. **DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah**
2. DAB28-09.01.05 Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah
3. DAB28-09.01.06 Pengelolaan Informasi Daerah Lainnya



Kode Proses DAB28-09.01.04

NO	NAMA PROSES/DESKRIPSI	INPUT	OUTPUT
1.	Mengelola Informasi Pembangunan Daerah <i>Pengelolaan informasi yang memuat</i> <i>(a) data perencanaan pembangunan daerah,</i> <i>(b) informasi perencanaan pembangunan daerah, serta</i> <i>(c) analisis dan profil pembangunan daerah</i>	1. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 3. Data spasial 4. Informasi perencanaan pembangunan daerah 5. Data KLHS 6. Data kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 7. Data keuangan daerah	1. RPJPD 2. Perubahan RPJPD 3. RPJMD 4. Perubahan RPJMD 5. RKPD 6. Perubahan RKPD 7. Renstra PD, 8. Perubahan Renstra PD 9. Renja PD 10. Perubahan Renja PD 11. Hasil Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

PROSES BISNIS LEVEL I-DAB28-09.01.04 MENGELOLA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis level 1-
DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan
Daerah ini meliputi:

1. **DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah**
2. **DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**
3. **DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
4. **DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah**



Kode Proses DAB28-09.01.04.01

NO	NAMA PROSES/DESKRIPSI	INPUT	OUTPUT
1.	Mengelola Data Perencanaan Pembangunan <i>Pengelolaan data hasil evaluasi pemerintah daerah, data kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan data gambaran umum kondisi daerah</i>	1. Data Spasial 2. Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Data KLHS 4. Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Informasi Penganggaran 6. Informasi Pelaksanaan Anggaran 7. Laporan Keuangan	Data-Data Gambaran Umum Kondisi Daerah seperti: 1. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (Output) sub kegiatan, Hasil (Outcome) urusan/lintas urusan, dan dampak (Benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok. 2. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan 3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan 4. Dsb.

Kode Proses DAB28-09.01.04.02

NO	NAMA PROSES/DESKRIPSI	INPUT	OUTPUT
1.	Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah <i>Proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD, RPD, Perubahan RPD)</i>	Data-Data Gambaran Umum Kondisi Daerah seperti: 1. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (Output) sub kegiatan, Hasil (Outcome) urusan/lintas urusan, dan dampak (Benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok. 2. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan 3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan 4. Dsb.	1. Target indikator sasaran pokok RPJPD 2. Target indikator sasaran pokok Perubahan RPJPD 3. Target program RPJMD 4. Target program Perubahan RPJMD 5. Target sub Kegiatan RKPD 6. Target sub Kegiatan Perubahan RKPD 7. Data Tahapan sub Kegiatan RKPD 8. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan RKPD 9. Target program dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu



MATRIKS RELASI ANTAR ENTITAS DATA

	RELASI	RPJPD / Perubahan RPJPD	RPJMD/ Perubahan RPJMD	RKPD	Perubahan RKPD	RPD	Perubahan	Renja PD	Perubahan Renja PD	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Sub Kegiatan	Tahapan	APBD	Rancangan APBD	KUA	PPAS	RKA SKPD	Perubahan APBD	Rancangan Perubahan APBD	Perubahan KUA	Perubahan PPAS	SKPD	Pergeseran RKA SKPD	DPA SKPD	AKPD	SPD	BKU Pendapatan	SPJ Pendapatan	BKU Belanja	SRJ Belanja	Pembiayaan	BKU Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan	SPJ Pengeluaran Pembiayaan	Pendapatan	Pendapatan	Jurnal Belanja	Belanja	Pembiayaan	Pembiayaan		
1	RPJPD/ Perubahan RPJPD	x			x				x																																		
2	RPJMD/ Perubahan RPJMD	x	x	x		x			x	x																																	
3	RKPD		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
4	Perubahan RKPD			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
5	RPD	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x																														
6	Renstra PD/ Peubahan Renstra PD		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x																														
7	Renja PD			x	x		x	x	x	x	x	x	x																														
8	Perubahan Renja PD			x	x		x	x	x	x	x	x	x																														
9	Sasaran Pokok	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
10	Indikator Kinerja Daerah		x	x	x	x	x	x	x																																		
11	Sub Kegiatan			x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
12	Tahapan			x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			

SIPD memuat

1. 70 entitas data
2. 12 entitas data Informasi Pembangunan Daerah
3. 38 entitas data Informasi Keuangan Daerah
4. 19 entitas data Informasi Pemda Lainnya

DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | **DSSD DALAM E-WALIDATA SIPD RI**



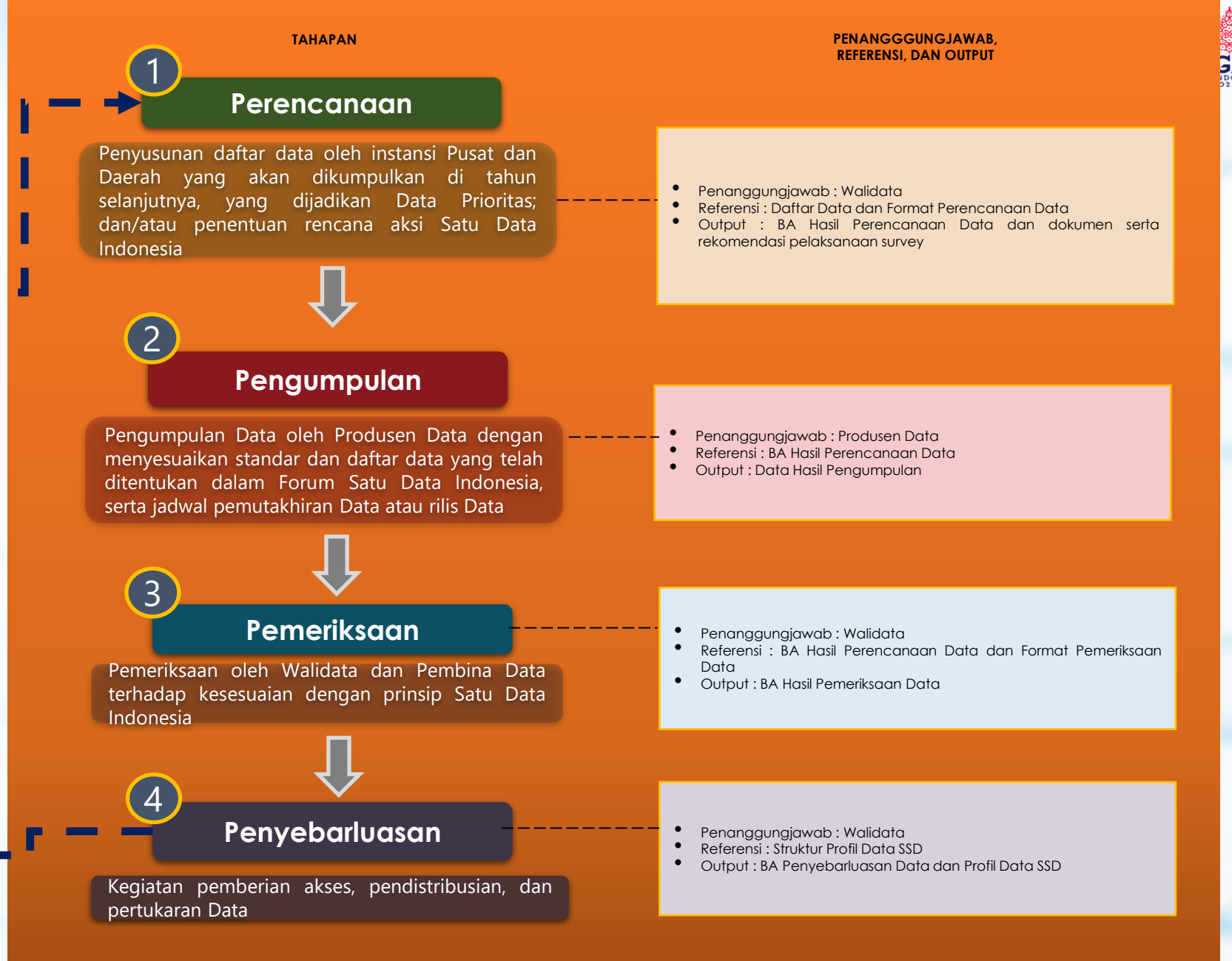
PROSES BISNIS E-WALIDATA

Daftar Data SSD

1. Data SSD Induk
2. Data SSD Pilihan/Prioritas
3. Data SSD Penugasan

Lampiran UU 23/2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Pasal 10 Perpres 39/2019 klasifikasi data bersumber dari kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

Data SSD yang valid menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah



Catatan:

- Seluruh proses melibatkan seluruh aktor Forum SSD (walidata, produsen data, dan pembina data) sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Seluruh proses dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi dalam eWalidata Statistik Sektoral Daerah

EWALIDATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH



1. **Data Induk** adalah **keseluruhan daftar Data SSD** yang memuat seluruh urusan atau sektor dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. **Data Prioritas** adalah **daftar data terpilih** dari Daftar Data SSD induk yang harus dipedomani Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SSD
3. **Data Penugasan** adalah daftar data yang **terpilih dari Daftar Data SSD Induk** atau **selain dari Daftar Data SSD Induk** berdasarkan amanat peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah

1 PERENCANAAN
1 September 2022 s/d 9 September 2022

- Identifikasi kebutuhan dan Sumber Data
- Susun Metode Pengumpulan dan Verifikasi Internal
- Susun Instrumen Pengumpulan
- Berkoordinasi dengan Pengampu Sektor
- Susun Instrument Validasi dan Verifikasi Data
- Download Format Berita Acara Perencanaan Data
- Upload Berita Acara Perencanaan Data

2 PENGUMPULAN DATA
10 September 2022 s/d 14 September 2022

- Melakukan Pengumpulan Data (survey, kompilasi, dan lain-lain)
- Berita Acara koordinasi dengan pengampu sektor di kab/kota dan dengan Pembina Urusan Pemerintah Daerah
- Melakukan koordinasi pengumpulan data oleh OPD
- Memberi rekomendasi rencana pengumpulan data oleh OPD.
- Memberikan informasi untuk pengumpulan data statistik sektoral provinsi
- Pengisian Data Statistik Sektoral Daerah oleh Produsen Data

3 PEMERIKSAAN DATA
15 September 2022 s/d 21 September 2022

- Pejabat OPD memberi persetujuan data yang dikumpulkan
- Melakukan pemeriksaan (validasi dan verifikasi) data yang dihasilkan oleh OPD
- Mengoordinasikan hasil pemeriksaan data dengan Pembina urusan pemerintahan daerah
- Verifikasi Data Statistik Sektoral Daerah Oleh Walidata

4 PENYEBARLUASAN DATA
21 September 2022 s/d 30 September 2022

- Mengolah data sektoral menjadi informasi/pengetahuan (Produsen Data/OPD)
- Memfaatkan hasil olah data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (Produsen Data/OPD)
- Menyebarkan data (Walidata/Diskominfo, Statistik, Persandian)
- Mengoordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral dengan provinsi dan Pembina urusan pemerintahan daerah (Walidata/Diskominfo, Statistik, Persandian)
- Mengolah dan menyajikan informasi statistik sektoral pada dokumen daerah dalam angka (BPS)
- Bappeda memanfaatkan data statistik sektoral untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Bappeda)
- Sekretariat SDI berkoordinasi dengan SDI Kab/Kota dan pusat dalam pengelolaan satu data Indonesia (Bappeda)
- Posting Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 39/2019, **tahapan walidata** berpedoman pada tahapan SDI:

1. Perencanaan
2. Pengumpulan Data
3. Pemeriksaan Data
4. Penyebarluasan Data

Penguatan Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Statistik Sektoral Di Daerah (E-Walidata)

T. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	2	3	4	5
1.	Statistik Dasar	Penyelenggaraan statistik dasar.	---	---
2.	Statistik Sektoral	---	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.



Urusan /Unsur	Bidang Urusan / Bidang Unsur	Progra m	Kegiata n	Sub Kegiata n	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	DSSD
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	1. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2. Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi 3. Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	1. Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil 2. Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 2. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data 3. Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	1. Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 2. Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data

Pemutakhiran Bidang Urusan Statistik Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Statistik Sektoral Di Daerah

- Berdasarkan Lampiran UU 23/2014, **penyelenggaraan statistik sektoral** di daerah merupakan kewenangan Urusan Pemerintahan **Bidang Statistik**.
- Ditjen Bina Bangsa bersama BPS telah melakukan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan Statistik dalam Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023, terhadap masing-masing **5 Sub Kegiatan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan hasil Pemutakhiran dimaksud **dapat dilaksanakan dan dianggarkan oleh Pemda utk Penguatan Walidata di Daerah**.

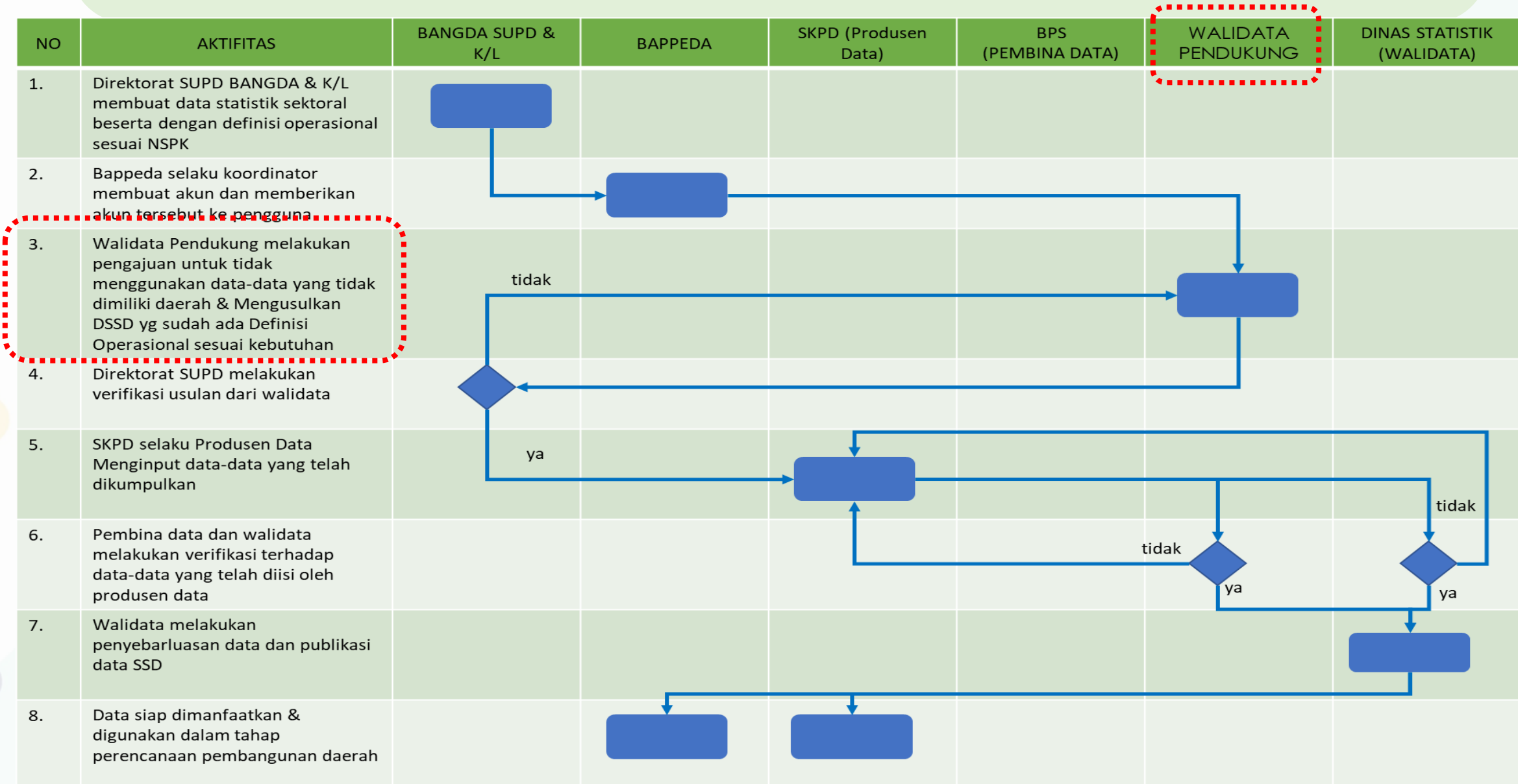
PENGUATAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH (E-WALIDATA)

No	URUSAN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Definisi Operasional
1	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	- Definisi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. - Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah - Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD.
2	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	- Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah. - Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat Daerah. - Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah. - Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah. - Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah.

- Dalam rangka penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran **Dinas Teknis Daerah selaku produsen data dan walidata pendukung**, dilakukan **pemutakhiran** sub kegiatan dalam **Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023** pada Program Penunjang Pemerintahan Daerah, sebanyak masing-masing 2 **Sub Kegiatan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**.
- Sub Kegiatan dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan **pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata pendukung**.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan hasil Pemutakhiran dimaksud **dapat dilaksanakan dan dianggarkan oleh setiap Dinas Teknis di daerah**.



SOP eWALIDATA dalam SIPD



Contoh Konsep Pembagian Peran di Prov. Jabar

Tingkat Daerah (Provinsi /Kab/Kota)

DEWAN
PENGARAH
PUSAT

FORUM SDI
TINGKAT DAERAH

SEKRETARIAT SDI
BAPPEDA
JAWA BARAT

PEMBINA DATA
BADAN PELAKSANA KEMENTERIAN
PROVINSI JAWA BARAT
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

WALIDATA
diskominfo
jabar

WALIDATA
PENDUKUNG
UNIT KERJA PENGELOLA DATA
PDIBIRO

PRODUSEN
DATA
SELURUH PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

BAPPEDA

Walidata

Produsen
data

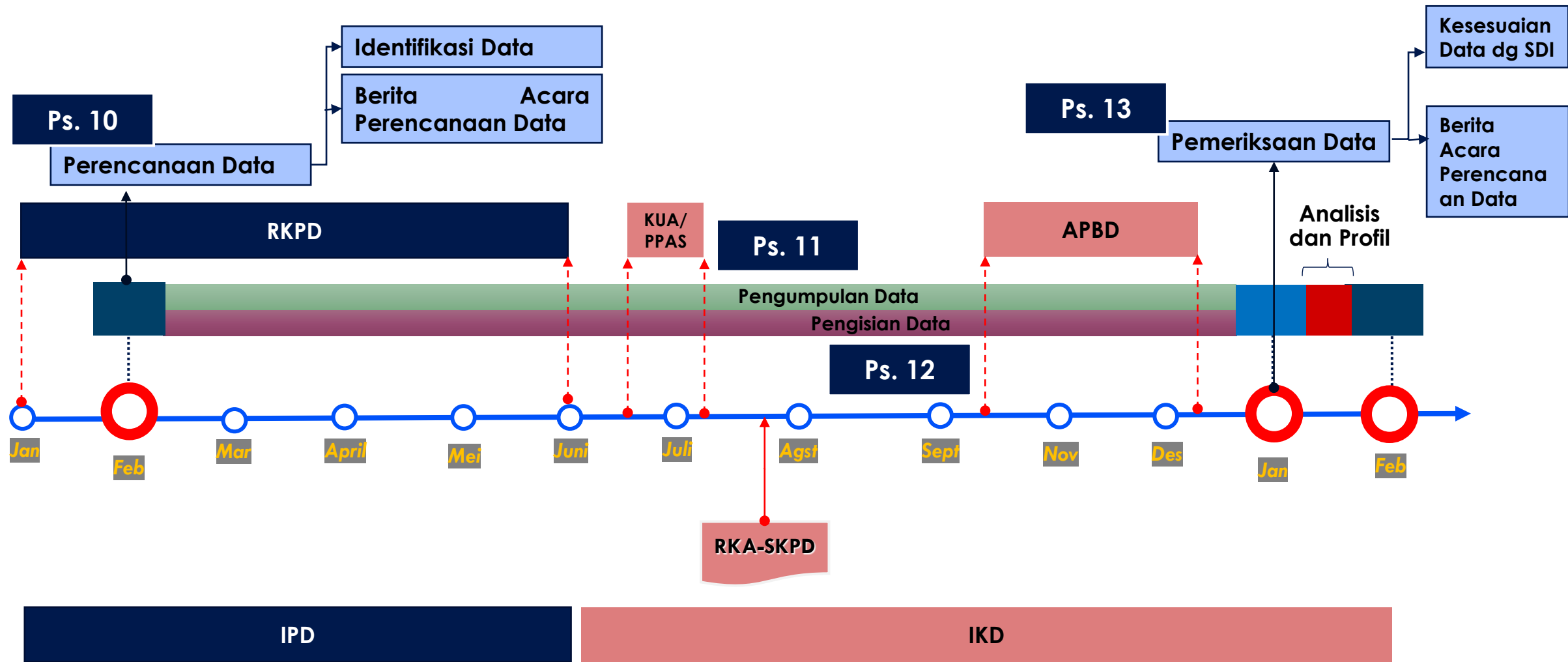


di Prov Jabar sudah
tersedia, minimal
stakeholder:

1. Bappeda
2. Walidata
3. Produsen

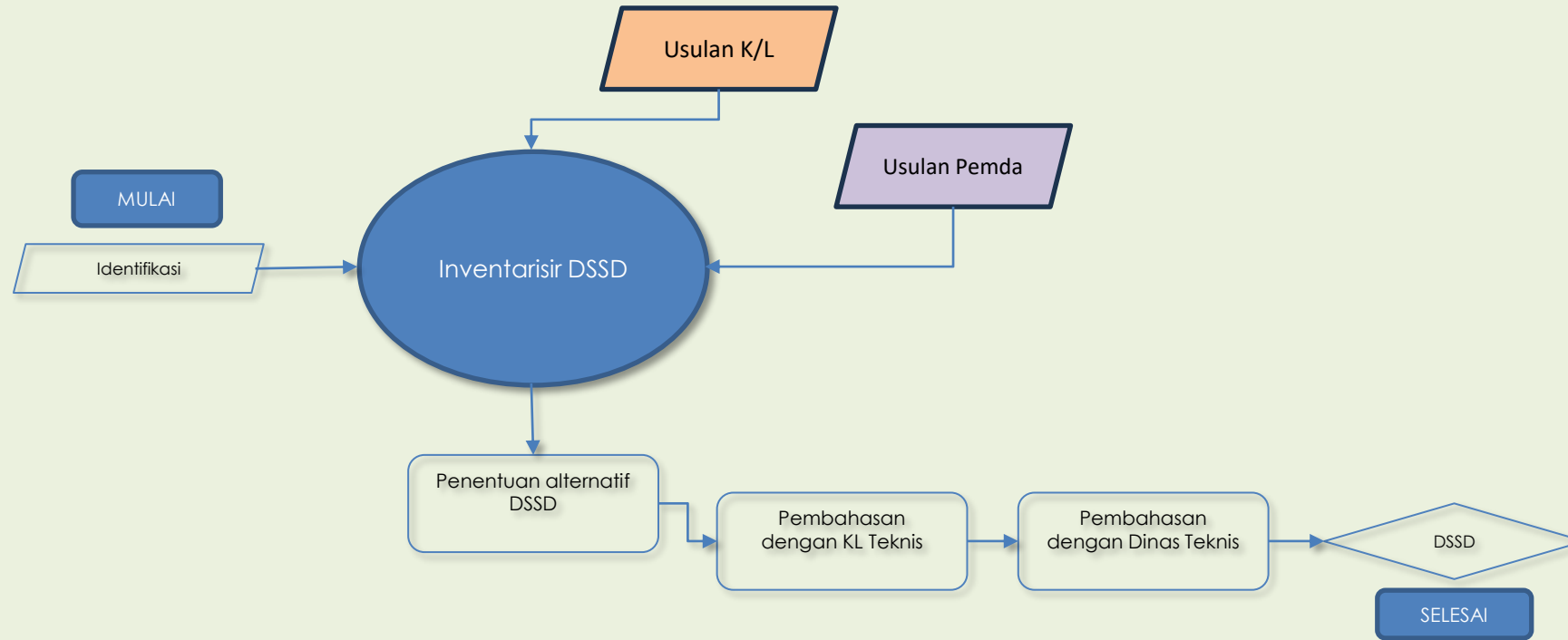
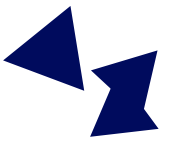


Contoh Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Data





ALUR PROSES PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) DALAM E-WALIDATA



1. Penyusunan DSSD merupakan **keepakatan pembahasan bersama antara Subdit Pengampu Urusan Ditjen Bina Bangda, K/L Teknis dan Dinas Teknis (Pemda).**
2. DSSD disusun dengan **berdasarkan Sub Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Daerah**, sehingga DSSD yang ditetapkan sudah **berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.**
3. Dengan demikian, dapat **mempermudah Pemda** untuk mengumpulkan dan memanfaatkan DSSD untuk pembangunan daerah

Permasalahan

Penyelesaian

Solusi

Kondisi/Isu/Permasalahan:

1. Rumah Sakit Kurang ?
2. Sarana Kurang ?
3. Prasarana Kurang ?
4. Tempat Tidur Kurang ?

Berdasarkan Data:

1. akurat,
2. mutakhir,
3. terpadu,
4. dapat dipertanggungjawabkan,
5. mudah diakses
6. dibagipakai,
7. dikelola secara seksama,
8. terintegrasi
9. Berkelanjutan

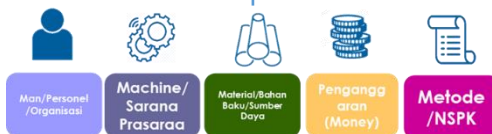
(Perpres 39/2019 SDI)

1.02.02.2.01.01
Pembangunan **Rumah Sakit** Beserta **Sarana** dan **Prasarana** Pendukungnya

Terpenuhinya **rumah sakit** baru dengan rasio **tempat tidur** terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000

Jumlah **rumah sakit** baru yang memenuhi rasio **tempat tidur** terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000

Unit



Kewenangan Daerah

Hasil dari respon pelaksanaan Sub Kegiatan untuk menyelesaikan Kondisi/Isu/Permasalahan

Indikator hasil pelaksanaan

Data dapat diukur SMART:

1. Spesifik (Jelas)
2. Measureable (Terukur)
3. Achieveable (Dapat Dikerjakan)
4. Relevan dengan Permasalahan
5. Time-Bound (Tahunan)

DATA

SATUAN

Jumlah Rumah Sakit

Unit

Tempat tidur

Unit

Ruang OK

Ruang

Laboratorium

Unit

Apotek

Sarana

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)

Kewenangan Provinsi, Kabupaten dan Kota

7446 DSSD

No	Kode SSD	Statistik Sektoral	Tag Sub Kegiatan	Satuan	Cakupan (Prov/Kab/Kota/Kec/Desa)	Publish	Aksi
1	1.01.000001	Asrama sekolah Tag Data Kelompok SSD 1.01.02.1.01.0013 1.01.02.1.03.0007 1.01.02.1.02.0009 1.01.02.2.02.0008		Unit Kab Kota Kec		☒ Ya	
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi 1.01 Tag Data Kelompok SSD 1.01.02.1.01.0069 1.01.02.1.02.0071 1.01.02.1.03.0076 1.01.02.2.02.0063		Unit Kab Kota		☒ Ya	
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak 1.01 Tag Data Kelompok SSD 1.01.02.1.01.0013 1.01.02.1.03.0007 1.01.02.1.02.0009 1.01.02.2.02.0008		Unit Kab Kota		☒ Ya	
4	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat 1.01 Tag Data Kelompok SSD 1.01.02.1.01.0013 1.01.02.1.03.0007 1.01.02.1.02.0009 1.01.02.2.02.0008		Unit Kab Kota		☒ Ya	
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun 1.01 Tag Data Kelompok SSD 1.01.06.2.01.0007		Dokumen Kab Kota		☒ Ya	

Kelengkapan Defops		
Defops DSSD	4280	/ 7446
Defops DSSD Publish	4069	/ 6813
Defops DSSD Prov	2513	/ 4311
Defops DSSD Kab	2838	/ 5044
Defops DSSD Kota	2797	/ 5003

1. Di dalam e-Walidata terdapat DSSD sebanyak 7446 data dari 48 Bidang Urusan (Konkuren dan Non Konkuren)
2. DSSD dalam E-Walidata dilengkapi dengan:

a. Kodefikasi

b. Nomenklatur data

c. Satuan data

d. Definisi operasional data

e. Tagging Sub Kegiatan yang didukung

f. Tagging tematik data

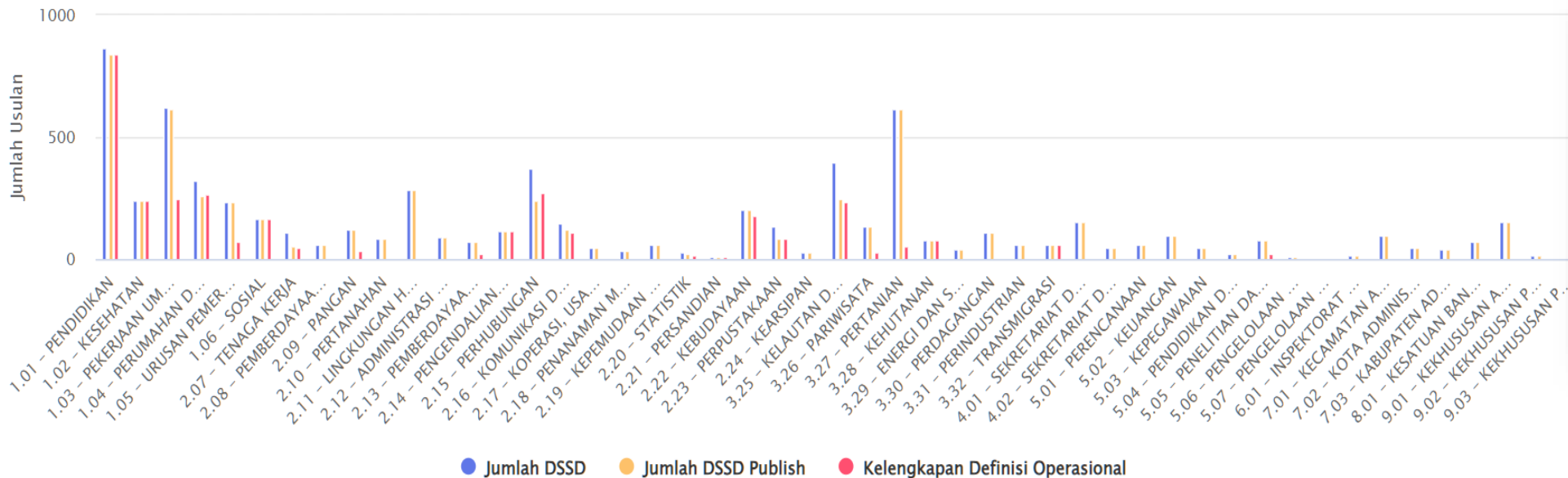
g. Cakupan Data

KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL DSSD

Grafik Rekap Master DSSD Per Urusan

Rekap Master DSSD

Berdasarkan Urusan



Kelengkapan Defops

Defops DSSD	4257 / 7438
Defops DSSD Publish	4046 / 6806
Defops DSSD Prov	2490 / 4303
Defops DSSD Kab	2817 / 5038
Defops DSSD Kota	2776 / 4997

Sumber: e-Walidata SIPD

1. Di dalam e-Walidata **terdapat DSSD sebanyak 7434 data** dari 48 Bidang Urusan (Konkuren dan Non Konkuren)
2. DSSD yang disediakan **Definisi Operasional sebanyak 4257 data (57%)**
3. Oleh karena itu, bagi Bidang Urusan yang belum dilengkapi definisi operasional DSSD **harap segera dilengkapi.**



KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL DSSD PER BIDANG URUSAN

KODE	URUSAN	SUPD	JUMLAH DSSD	JUMLAH DSSD PUBLISH	KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL	PRESENTASE
3.28	KEHUTANAN	1	80	79	80	101%
3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	42	42	42	100%
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	1	288	288	258	90%
2.09	PANGAN	1	204	204	123	60%
3.27	PERTANIAN	1	641	639	88	14%
2.10	PERTANAHAN	1	90	90	0	0%
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	151	124	151	122%
2.20	STATISTIK	2	30	25	30	120%
2.15	PERHUBUNGAN	2	372	242	274	113%
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	488	355	374	105%
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	324	264	266	101%
2.21	PERSANDIAN	2	12	12	12	100%
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	758	695	487	70%
1.02	KESEHATAN	3	246	244	246	101%
1.06	SOSIAL	3	169	166	167	101%
2.22	KEBUDAYAAN	3	204	204	182	89%
2.18	PENANAMAN MODAL	3	38	38	25	66%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	260	260	92	35%
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	75	75	24	32%
3.26	PARIWISATA	3	140	140	31	22%
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3	52	52	3	6%
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	3	93	93	0	0%
3.30	PERDAGANGAN	3	110	110	0	0%
3.31	PERINDUSTRIAN	3	63	63	0	0%

KODE	URUSAN	SUPD	JUMLAH DSSD	JUMLAH DSSD PUBLISH	KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL	PRESENTASE
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	4	90	26	28	108%
1.01	PENDIDIKAN	4	880	851	853	100%
2.07	TENAGA KERJA	4	114	56	56	100%
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	119	119	119	100%
2.23	PERPUSTAKAAN	4	139	88	88	100%
3.32	TRANSMIGRASI	4	60	60	60	100%
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	60	60	0	0%
2.24	KEARSIPAN	4	32	32	0	0%
5.01	PERENCANAAN		64	64	64	100%
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		82	82	28	34%
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		154	154	0	0%
4.02	SEKRETARIAT DPRD		52	52	0	0%
5.02	KEUANGAN		103	103	0	0%
5.03	KEPEGAWAIAN		48	48	0	0%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		26	26	0	0%
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN		13	13	0	0%
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG		5	5	0	0%
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		16	16	0	0%
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI		97	97	0	0%
7.02	KOTA ADMINISTRASI		50	50	0	0%
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI		41	41	0	0%
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		77	77	0	0%
9.01	KEKHUSUSAN ACEH		154	154	0	0%
9.02	KEKHUSUSAN PAPUA		20	20	0	0%
9.03	KEKHUSUSAN PAPUA BARAT		3	3	0	0%

➤ Berdasarkan keterisian DSSD per Urusan, **Bidang Urusan yang telah melengkapi definisi operasional** seluruh DSSD baru sebanyak **17 Urusan**, yaitu:

- | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. Kominfo | 6. Kehutanan | 11. Tenaga Kerja | 16. Transmigrasi |
| 2. Statistik | 7. Kesehatan | 12. PPKB | 17. Perencanaan |
| 3. Perhubungan | 8. Perkim | 13. Persandian | |
| 4. Kepemudaan Dan Olaraga | 9. Sosial | 14. Perpustakaan | |
| 5. Kelautan Dan Perikanan | 10. Pendidikan | 15. ESDM | |

OUTPUT/LAPORAN E-WALIDATA (PENYEBARLUASAN DATA)

SURAT KEPUTUSAN (...)

Nomor:

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL PADA E-WALIDATA SIPD



- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota telah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Produsen Data, dan/atau Walidata daerah;
 - bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - bahwa telah dilakukan kesepakatan antara Pembina data dan Walidata Daerah daftar data statistik sektoral yang tertuang dalam hasil Berita Acara penyebaran data statistik sektoral (.....)
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Memperhatikan** :
- Hasil pemeriksaan data statistik sektoral
 - Berita acara penyebaran data

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan data statistik sektoral (.....) telah memenuhi ketentuan Prinsip Satu Data Indonesia
- Kedua** :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan data statistik sektoral (.....), maka dapat dilakukan penyebaran data oleh Walidata Daerah melalui pada e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Ketiga** :
- Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
a.n. Kepala Daerah,

Ttd.

(Nama)
(NIP)

LAMPIRAN I : SUSUNAN KEANGGOTAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH (.....)

NOMOR :

TANGGAL :

- a. Pembina Data Daerah : Kepala Badan Pusat Statistik
- b. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (.....)
- c. Walidata Pendukung Daerah : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (.....)
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah (....)
3. dst....
- d. Produsen Data Daerah : 1. Kepala Dinas Kesehatan (...)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (...)
3. dst....

LAMPIRAN II: DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

No.	Bidang Urusan	Kode DSSD	Variabel DSSD	Satuan	SKPK Penanggung Jawab
1.	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	DISDIKBUD

Output/Laporan e-Walidata adalah Surat Keputusan (SK) sebagai arahan Kepala Daerah terkait Penyebarluasan Data Statistik Sektoral pada e-Walidata SIPD



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



G20
INDONESIA
2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif